



BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah telah diarahkan untuk menjamin ketersediaan anggaran bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sementara itu, pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan terkait pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang belum seluruhnya dapat ditangani, baik karena alasan administratif, ketersediaan sarana dan prasarana, maupun karena alasan masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur pengelola keuangan di daerah ini.

Gambaran umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah kurun waktu lima tahun ke depan (2013-2018). Gambaran umum dan analisis pengelolaan keuangan daerah tahun 2007-2011 mencakup : (1) struktur pendapatan beserta komponennya; (2) struktur belanja daerah beserta komponennya; (3) trend perkembangan pembiayaan defisit/surplus; dan (4) trend besaran penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada kurun waktu 2007-2011, telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahannya. Indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain ditunjukkan RPJMD Provinsi oleh kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dicapainya berbagai indikator kinerja pembangunan daerah, baik indikator kinerja ekonomi makro maupun sektoral. Meskipun demikian, dalam hal pengelolaan pendapatan daerah belum seluruhnya dapat dioptimalkan terutama pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjukkan oleh rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan yang lebih baik yang ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan semakin berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, kemampuan daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari PAD menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan APBD dan kemandirian suatu daerah.

Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2007-2011, antara lain dapat dicermati dari target dan realisasi APBD setiap tahunnya, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2007-2011 Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut.



Tabel 104. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

No.	Uraian	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	679.900.265.018.00	957.848.767.125.05	1.030.720.130.652.09	1.055.173.629.666.03	1.288.979.728.356,16	18.26
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	140.365.467.264.00	296.603.456.548.05	223.128.480.722.09	339.360.819.004.03	346.169.830.959,16	35.16
1.1.1.	Pajak Daerah	99.492.414.515.00	150.462.598.850.00	171.402.250.571.00	202.929.980.966.00	262.509.201.604.00	112.90
1.1.2.	Retribusi Daerah	16.656.739.807.00	19.790.108.796.00	40.252.603.584.00	51.035.765.321.00	18.543.869.680.00	21.34
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.904.920.287.00	11.732.028.078.00	4.871.003.708.00	14.103.892.280.00	13.488.191.495.00	158.45
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	15.311.392.655.00	114.618.720.824.05	6.602.622.859.00	71.291.180.437.03	51.628.568.180,16	376.63
1.2.	Dana Perimbangan	524.663.375.677.00	657.211.240.177.00	705.062.821.830.00	691.637.810.662.00	817.385.234.124.00	12.21
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	62.822.375.677.00	60.909.858.177.00	58.900.687.830.00	71.842.992.276.00	82.744.077.124.00	7.70
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	461.841.000.000.00	566.435.382.000.00	589.844.134.000.00	595.762.419.000.00	700.836.557.000.00	11.36
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	-	29.866.000.000.00	56.318.000.000.00	24.032.400.000.00	33.804.600.000.00	17.98
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.871.422.077.00	-	43.026.050.100.00	24.175.000.000.00	125.424.663.273.00	93.75
1.3.1	Hibah	4.871.422.077.00	-	-	24.175.000.000.00	84.741.046.746.00	62.63
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ***)	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus****)	10.000.000.000.00	4.034.070.400.00	59.502.778.000.00	-	38.728.571.000.00	328.84
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	1.955.045.527.00	0.00

Sumber : BPKAD Prov. Sultra



Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 18,26 persen. Penyumbang terbesar pendapatan daerah dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara bersumber dari dana perimbangan. Sedangkan kontribusi PAD Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2007-2011 berkisar antara 20,65 s/d 32,17 persen. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 26,41 persen. Ini berarti bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber-sumber penerimaan lain di luar PAD sangat tinggi yaitu sebesar 73,59 persen. Dengan demikian, sumber utama pendapatan daerah dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tenggara berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), maupun dana transfer lainnya. Karena itu, kinerja pengelolaan PAD masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian daerah, maka perlu dioptimalkan pengelolaan PAD dengan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target PAD selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain: (1) Data obyek dan potensi sumber PAD yang masih minim, (2) Rendahnya kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah, (3) Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah, (4) Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan (5) belum maksimalnya penagihan pajak. Hal ini berarti bahwa berbagai upaya untuk mengefektifkan penggalian sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari PAD perlu terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat lambat laun dapat dikurangi. Di samping itu, perlu terobosan melalui berbagai alternatif peningkatan PAD terutama dari pos pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, pertumbuhan penduduk dan faktor-faktor lainnya serta kemampuan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007-2011, maka proyeksi pertumbuhan PAD setiap tahunnya berkisar antara sebesar 18,26 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan dana perimbangan diproyeksikan sekitar 12,21 persen setiap tahunnya.

3.1.2. Neraca Daerah

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan obyek-obyek dan sumber-sumber pendapatan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut, diwujudkan dalam bentuk pendekatan eksternal dan internal yang dalam pelaksanaannya tercermin dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan pengelolaan belanja daerah di susun dan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan mendesak, guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, dalam alokasi anggaran pada berbagai bidang dan program dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kehati-hatian, prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tidak mengurangi komitmen untuk tetap berbuat secara optimal bagi kepentingan rakyat yang tercermin dari besarnya prosentase alokasi belanja langsung yang secara rata-rata di atas 50 persen.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas, prinsip efisiensi dan efektifitas, serta prinsip disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah juga memperlihatkan perbaikan yang ditandai dengan opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD), dimana pada tahun 2011 dan 2012 secara berturut-turut mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dimana pada tahun sebelumnya memperoleh predikat Disclaimer.



Gambaran umum proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir maka disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 105. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

No	Uraian	(2009) (%)	(2010) (%)	(2011) (%)
A	Belanja Tidak Langsung	446.271.524.605 (39,86%)	597.811.704.897 (53,11%)	699.679.828.321.03 (52,69%)
1	Belanja Pegawai	286.532.406.394 (64,21%)	312.193.784.967 (52,23%)	346.075.530.658 (49,47%)
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	17.724.951.975 (0,01%)	7.860.207.000 (1,32%)	9.616.003.468 (1,38%)
5	Belanja Bantuan Sosial	10.019.034.611 (2,25%)	75.477.399.621 (12,63%)	18.176.487.725,73 (2,60%)
6	Belanja Bagi Hasil	60.160.658.250 (13,48%)	79.660.625.009 (13,33%)	73.047.479.632 (10,44%)
7	Belanja Bantuan Keuangan	70.729.016.875 (15,85%)	120.671.756.500 (20,19%)	250.939.326.837,30 (35,87%)
8	Belanja Tidak Terduga	1.105.456.500 (0,25%)	1.947.931.800 (0,33%)	1.825.000.000 (0,26%)
B	Belanja Langsung	673.428.859.619,15 (60,15%)	527.876.245.834 (46,90)	628.344.871.639.03 (47,32%)
1	Belanja Pegawai	111.288.326.996(16,53%)	64.253.625.779 (12,18%)	62.281.696.919 (9,92%)
2	Belanja Barang dan Jasa	260.377.146.872,15 (38,67%)	228.258.763.062 (43,24%)	224.565.347.569.03 (35,74%)
3	Belanja Modal	301.763.385.751 (44,81%)	235.363.856.993 (44,59%)	341.497.827.151 (54,35%)

Sumber : BPKAD Prov. Sultra

Berdasarkan Tabel 106 di ketahui bahwa belanja pembangunan daerah atau belanja langsung mengalami penurunan, sedangkan belanja tidak langsung terus mengalami peningkatan terutama untuk belanja pegawai, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai negeri sipil (PNS), belanja subsidi dan belanja bantuan keuangan.



Tabel 106. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	(2009) (Rp)	(2010) (Rp)	(2011) (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	321.714.549.107.00	372.509.358.043.00	398.687.754.190.00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.532.406.394.00	312.193.784.967.00	346.075.530.658.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	25,102,492,267.00	50,631,119,538.00	45.058,602,471.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.246.000.000.00	1.324.000.000.00	1.352.000.000.00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	8.833.650.446.00	8.360.453.538.00	6.201.621.061.00
B	Belanja Langsung	722.849.540.498.00	386.954.473.963.00	476.212.925.431.00
1	Belanja Honorarium PNS**)	129,358,189,719.00	41,773,415,461.00	15,156,785,321.00
2	Belanja Uang Lembur**)	1,364,922.000.00	732,740,766.00	745,928,372.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3,797,310.000.00	2,436,600.000.00	50.000.000.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	3,971,464,500.00	4,783,507.000.00	3,367,213,490.00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.276.971.113.00	3.766.023.930.00	4.251.034.861.00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai***)	60,880,978,464.00	21,121,583,673.00	34,206,867,693.00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	107,460,500.00	1,642,335,425.00	671,367,909.00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	40,732,683.030.00	1,931,486,225.00	1,918,749,900.00
9	Belanja Perjalanan Dinas**)	177,595,993,421.00	73,402,924,490.00	74,347,150,734.00
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-
11	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	301.763.385.751.00	235.363.856.993.00	341.497.827.151.00
	TOTAL	1.044.563.907.605.00	759.463.832.006.00	874.900.679.621.00

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012



3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurun waktu tiga tahun disajikan pada tabel berikut.

Tabel 107. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran (2009)	1.044.563.907.605.00	1.123.906.281.733,15	92,94%
2	Tahun Anggaran (2010)	759.463.832.006.00	1.153.043.579.578,66	65,87%
3	Tahun Anggaran (2011)	874.900.679.621.00	1.483.351.185.480,72	58,99%

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2009, alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 92,94 persen dari total belanja daerah sebesar Rp 1.123.906.281.733,15 pada tahun 2010 mengalami penurunan sekitar 27,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2010 mencapai 65,87 persen dari total belanja daerah.

Tabel 108. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	(2009) (Rp)	(2010) (Rp)	(2011) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	446.271.524.605.00	597.811.704.897.00	699.679.828.321.03	25.50
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.532.406.394.00	312.193.784.967.00	346.075.530.658.00	9.91
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.246.000.000.00	1.324.000.000.00	1.352.000.000.00	4.19
3	Belanja Bunga	-	-	-	-
4	Belanja Bagi hasil	60.160.658.250.00	79.660.625.009.00	73.047.479.632.00	12.06
B	Belanja Langsung	673.428.859.619,15	527.876.245.834	628.344.871.639.03	(1.29)
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis.	9,378,842,613.00	381.200.000.00	475,340.000.00	(35.62)
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3,797,310.000.00	-	50.000.000.00	0.00
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor Seperti Listrik, Air, Telepon dan Sejenisnya)	8,806,329,806.00	5,331,758,303.00	6,961,121,293.00	(4.45)
4	Belanja Sewa Gedung Kantor (Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya)	1,979,708.093.00	3,792,141,996.00	3,148,974,683.00	37.30
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya)	3,172.082.000.00	1,968,178,360.00	549,766,900.00	(55.01)
	Dst ...	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	4,205,897,509.00	27,355,628,847.66	155,326,485,520.66	509.11
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	12,555,628,847.66	78,633,398,539.00	263.14
	Dst...				
	TOTAL (A+B+C)	1.123.906.281.733.15	1.153.043.579.578.66	1.483.351.185.480.72	15.62

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012



Tabel 109. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun n+1 (Rp)	Tahun n+2 (Rp)	Tahun n+3 (Rp)	Tahun n+4 (Rp)	Tahun n+5 (Rp)
A	Belanja TidakLangsung	1,362,873,337,497.00		1,499,160,671,246.70	1,649,076,738,371.37	1,813,984,412,208.51	1,995,382,853,429.36	2,194,921,138,772.29
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	418,751,392.096.18		460,626,531,305.80	506,689,184,436.38	557,358,102,880.02	613.093,913,168.02	674,403,304,484.82
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	163,592.000.000.00		179,951,200.000.00	197,946,3200	217,740,952.000.00	239,515.047,200.00	263,466,551,920.00
3	Belanja Bunga	31,250.000.000.00		34,375.000.000.00	37,812,500.000.00	41,593,750.000.00	45,753,125.000.00	50,328,437,500.00
4	Belanja Bagi Hasil	225,513,915,619.00		248.065,307,180.90	272,871,837,898.99	300,159,021,688.89	330,174,923,857.78	363,192,416,243.56
B	Belanja Langsung	676,492,935,130.00		744,142,228,643.00	818,556,451,507.30	900,412,096,658.03	990,453,306,323.83	1.089,498,636,956.22
1	Belanja Honorarium PNS Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis.	575,161,400.00		632,677,540.00	695,945,294.00	765,539,823.40	842.093,805,74	926,303,186,31
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60,500.000.000.00		66,550.000.000.00	73,205.000.000.00	80,525,500.000.00	88,578.050.000.00	97,435,855.000.00
3	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor Seperti Listrik, Air, Telepon dan Sejenisny)	8,422,956,764.53		9,265,252,440.98	10,191,777,685.08	11,210,955,453.59	12,332.050,998.95	13,565,256.098.84
4	Belanja Sewa Gedung Kantor(Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya)	3,810,259,366.43		4,191,285,303.07	4,610,413,833.38	5.071,455,216.72	5,578,600,738.39	6,136,460,812.23
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Yang Telah Ada Kontrak Jangka Panjangnya)	665,217,949.00		731,739,743.90	804,913,718.29	885,405.090.12	973,945,599.13	1.071,340,159.04
	Dst Sesuai Kriteria Wajib Mengikat							
C	Pengeluaran Pembiayaan	42.085.000.000.00		46,293,500.000.00	50,922,850.000.00	56.015,135.000.00	61,616,648,500.00	67,778,313,350.00
1	Pembentukan Dana Cadangan							
2	Pembayaran pokok utang	27,200.000.000.00		29,920.000.000.00	32,912.000.000.00	36,203,200.000.00	39,823,520.000.00	43,805,872.000.00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	2,961,292,675,822.14		3,257,421,943,404.35	3,583,164,137,744.79	3,941,480,551,519.27	4,335,628,606,671.19	4,769,191,467,338.32

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam menganalisis pembiayaan terlebih dahulu diuraikan data-data pendukung yaitu (1) Defisit riil anggaran dan (2) Realisasi sisa lebih.



3.2.2.1. Defisit Riil Anggaran

Tahun 2009 hingga tahun 2011, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara selalu mengalami defisit. Selisih antara defisit/surplus ditambah dengan pembiayaan dan dikurangi pengeluaran pembiayaan daerah, disebut sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan. Defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009-2011 adalah sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 110. Penutup Defisit Riil Anggaran

NO.	Uraian	(2009) (Rp)	(2010) (Rp)	(2011) (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.030.720.130.652.09	1.055.173.629.666.03	1.288.979.728.356.16
	Dikurangi Realisasi :			
2.	Belanja Daerah	1.119.700.384.224.15	1.125.687.950.731.00	1.328.024.699.960.06
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.205.897.509.00	27.355.628.847.66	155.326.485.520.66
A	Defisit Riil	88.980.253.572.06	70.514.321.064.97	39.044.971.603.90
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:	124.465.203.285.05	106.197.607.236.66	198.733.017.524.03
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Sebelumnya	107.910.610.790.05	31.279.097.203.00	8.327.657.324.03
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang diPisahkan	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	190.000.000.000.00
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	139.158.000.00	74.787.208.979.66	405.360.200.00
9.	Penerimaan Piutang Daerah	4.205.897.509.00	131.301.054.00	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	124.465.203.285.05	106.197.607.236.66	198.733.017.524.03
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	31.279.052.203.00	8.327.657.324.03	4.361.560.399.47

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Defisit anggaran yang terjadi karena belanja daerah lebih besar dibandingkan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar atau seluruhnya ditutupi oleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, tanpa perlu melakukan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan atau melakukan pinjaman daerah.

Komposisi penutup defisit riil anggaran Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2011 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 111. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(2009) (%)	(2010) (%)	(2011) (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Sebelumnya	107.910.610.790.05	31.279.097.203.00	8.327.657.324.03
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	190.000.000.000.00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	139.158.000.00	74.787.208.979.66	405.360.200.00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	4.205.897.509.00	131.301.054.00	-
7.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	31.279.052.203.00	8.327.657.324.03	4.361.560.399.47

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

3.2.2.2. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Persentase realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) terbesar terjadi pada tahun 2009, disebabkan oleh adanya penghematan belanja atau akibat lainnya yaitu sebesar 74,86 persen dan adanya kegiatan lanjutan sebesar 25,14 persen, demikian pula pada tahun 2009, persentase terbesar disebabkan karena adanya penghematan belanja atau akibat lainnya namun mengalami penurunan menjadi 68,35 persen dan kegiatan lanjutan menjadi 31,65 persen. Pada tahun 2010 realisasi sisa lebih perhitungan anggaran mengalami pergeseran, persentase terbesar disebabkan karena adanya kegiatan lanjutan yaitu sebesar 64,35 persen dan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan yaitu sebesar 35,65 persen. Realisasi SiLPA Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2009–2011 dapat di lihat pada tabel berikut.



Tabel 112. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

No.	Uraian	(2009)		(2010)		(2011)		Rata-rata pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	107.910.610.790.05	100	31.279.097.203.00	100	8.327.657.324.03	100	
2.	Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		
3.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-		-		-		
4.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-		-		-		
5.	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-		-		-		
6.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	3.018,109,111.00	100	-		-		
7.	Kegiatan Lanjutan	78,607,324,685.00	100	51,834,603,665.00	100	-		

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Defisit atau surplus anggaran pendapatan belanja daerah diakibatkan karena adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Bilamana terjadi surplus anggaran, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan dan sebaliknya jika terjadi defisit anggaran, maka dibiayai dari penerimaan pembiayaan. Struktur anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (2) pencairan dana cadangan (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) penerimaan pinjaman dan (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup : (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal pemerintah daerah, (3) pembayaran pokok hutang dan (4) pemberian pinjaman.

3.2.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Tabel 113. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran

No.	Uraian	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
1.	Saldo Kas Neraca Daerah	48.288.040.669.66	16.766.643.888.00	19.474.098.714.47
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	17.383.721.819.60	80.327.872.990.00	35.552.367.060.00
3.	Kegiatan Lanjutan	78,607,324,685.00	51,834,603,665.00	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	(47.703.005.834.94)	(115.395.832.767.00)	(16.078.268.345.53)

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012



3.2.2.4 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah

Tabel 114. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

No	Uraian	Data tahun dasar (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	Saldo Kas Neraca Daerah	19.474.098.714.47	16.15	2,142,150,858,591.70	2,356,365,944,450.87	2,592.002,538,895.96	2,851,202,792,785.55	3,136,323.072.064.11
	Dikurangi:							
1.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	35.552.367.060.00	(55.74)	3,910,760,376,600.00	4,301,836,414,260.00	4,732.020.055,686.00	5,205,222.061,254.60	5,725,744,267,380.06
2.	Kegiatan Lanjutan	-	-					
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	(16.078.268.345.53)	(86.07)	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012



3.2.3. Analisis Neraca Daerah

Kemampuan keuangan daerah diketahui dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap neraca daerah. Analisis neraca daerah dimaksud, terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas. Untuk memudahkan analisis neraca daerah, perlu diketahui gambaran perkembangan neraca daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 115. Neraca Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Per 31 Desember Tahun 2009-2011

Uraian	Tahun (Rp)		
	PER 31 DESEMBER 2009	PER 31 DESEMBER 2010	PER 31 DESEMBER 2011
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank			
Kas di Kas Daerah	5.798.259.774,59	7.698.475.464.00	4.900.677.785,47
Kas di Bendahara Pengeluaran	32.319.897.888.00	8.857.247.924.03	5.636.686.029.00
Kas di Bendahara penerimaan	10.169.883.007.07	210.920.500	164.659.820.00
Kas di Bendahara BLUD	0.00	0.00	8.772.075.080.00
Investasi Jangka Pendek	0.00		0.00
Piutang			0.00
Piutang pajak daerah	7.725.849.566.00	8.441.235.089.00	10.882.878.560.00
Piutang retribusi daerah	473.798.598.00	718.072.197.00	48.254.600.00
Piutang lainnya	2.892.533.645.00	17.309.884.141.00	40.433.480.870,55
Piutang BLUD			0.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		0.00	0.00
Persediaan	3.665.887.348.00	2.339.992.937,50	2.290.112.948.00
Belanja dibayar dimuka	719.136.000.00	765.802.666,67	760.848.329.00
JUMLAH ASET LANCAR	63.765.245.826,66	46.341.630.919,20	73.889.674.022,02
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Nonpermanen			
Investasi Nonpermanen - Dana bergulir	17.224.652.071.00	0.00	0.00
Investasi Nonpermanen Lainnya		11.010.702.864.00	10.666.598.364
Investasi Permanen			0.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	89.497.735.816,17	114.015.958.400,17	120.026.981.475,74
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	106.722.387.887,17	125.026.661.264,17	130.693.579.839,74
ASET TETAP			
Tanah	666.261.253.175.00	510.793.381.255.00	506.218.325.755.00
Peralatan dan Mesin	259.464.331.842.00	240.884.984.197.00	264.656.674.347.00
Gedung dan Bangunan	435.524.283.059.00	398.814.336.278.00	406.334.410.636.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	494.440.427.611.00	575.332.569.646.00	662.066.490.067.00
Aset Tetap Lainnya	18.575.796.100.00	12.162.981.025.00	5.373.049.300.00
Konstruksi dan Pengerjaan	95.089.652.801.00	101.571.352.906.00	254.319.623.245.00
JUMLAH ASET TETAP	1.969.355.744.588.00	1.839.559.605.207.00	2.098.968.573.350.00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0.00	0.00
JUMLAH DANA CADANGAN		0.00	0.00
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Ansuran	0.00	0.00	0.00
Tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00	0.00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	485.164.166,67
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00
Aset Tak Berwujud	628.917.000.00	628.917.000.00	628.917.000.00
Aset Lain-Lain	1.689.091.293.00	0.00	91.743.224.600.00
JUMLAH ASET LAINNYA	2.318.008.293.00	628.917.000.00	92.857.305.766,67
TOTAL ASET	2.142.161.386.594,83	2.011.556.814.390,37	2.396.409.132.978,43



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

Uraian	Tahun (Rp)		
	PER 31 DESEMBER 2009	PER 31 DESEMBER 2010	PER 31 DESEMBER 2011
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	6.839.105.458,60	8.228.066.064.00	14.947.879.495.00
Utang Perhitungan Pihak ketiga (PPK)	10.544.616.361.00	72.099.806.926.00	20.604.487.566.00
Utang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Kab/Kota	17.769.105.944,13	26.265.790.789.06	29.503.595.486.00
Utang Bunga		0.00	3.692.601.522,33
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.000.000.000.00	2.810.495.625.00	11.592.565.772,43
Utang BLUD		0.00	0.00
Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	39.152.827.763,73	109.404.159.404.06	80.341.129.842,64
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Pemerintah Pusat		0.00	190.000.000.000.00
Utang Dalam Negeri		0.00	0.00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	190.000.000.000.00
TOTAL KEWAJIBAN		109.404.159.404.06	270.341.129.842,64
EKUITAS DANA			
EKUITAS DANA LANCAR			
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA)	31.279.052.203,99	8.327.657.324.03	4.361.560.399,47
Pendapatan yang ditanggungkannya	10.169.883.007.07	210.920.500.00	164.659.820.00
Cadangan Piutang	11.092.181.809.00		
Cadangan Persediaan	3.665.887.348.00		
Cadangan Belanja yang Ditanggguhkan	719.136.000.00	764.802.666,67	760.848.329.00
Cadangan Piutang		26.469.191.427,50	51.364.614.030,55
Cadangan Persediaan		2.339.992.937,50	2.290.112.948.00
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka		0.00	0.00
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran			
Hutang jangka pendek	(32.313.722.305,13)	(101.176.093.340.06)	(65.393.250.347,64)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	24.612.418.062,93	(63.063.528.484,86)	(6.451.454.820,62)
EKUITAS DANA INVESTASI			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	106.722.387.887,17	125.026.661.264,17	130.693.579.839,74
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.969.355.744.588.00	1.839.559.605.207.00	2.098.968.573.350.00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2.318.008.293.00	628.917.000.00	92.857.305.766,67
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		0.00	(190.000.000.000.00)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2.078.396.140.768,18	1.965.215.183.471,17	2.132.519.458.956,41
EKUITAS DANA CADANGAN			
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		0.00	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN		0.00	0.00
TOTAL EKUITAS	2.103.008.558.831,10	1.902.151.654.986,31	2.126.068.004.135,79
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.142.161.386.594,83	2.011.555.814.390,37	2.396.409.133.978,43

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kewajiban dan ekuitas pada tahun 2009 sebesar Rp 2.142.161.386.594,83, pada tahun 2010 menurun sebesar Rp 130.605.572.204,46 atau sebesar Rp 2.011.555.814.390,37, dan pada tahun 2011 meningkat sebesar Rp 2.396.409.133.978,43. Berdasarkan angka-angka pada tabel, peningkatan tersebut antara lain disebabkan proporsi belanja modal dalam APBD Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011.



**Tabel 116. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2009-2011**

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	(16.07)
1.1.1.	Kas	40.72
1.1.2.	Piutang	(66.13)
1.1.3.	Persediaan	15.65
1.2.	ASET TETAP	(11.20)
1.2.1.	Tanah	(0.23)
1.2.2.	Peralatan dan mesin	(12.33)
1.2.3.	Gedung dan bangunan	0.55
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	(15.33)
1.2.5.	Aset tetap lainnya	24.76
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	(102.18)
1.3.	ASET LAINNYA	79.06
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	-
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-
1.3.4.	Aset tak berwujud	-
	JUMLAH ASET DAERAH	(13.31)
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	(76.44)
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	(153.18)
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	60.71
3.1.2.	Cadangan piutang	(116.34)
3.1.3.	Cadangan persediaan	19.15
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	(11.20)
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	29.11
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	(13.31)

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan jumlah aset ataupun jumlah kewajiban dan ekuitas dana sekitar 13,31 persen. Berdasarkan neraca daerah tahun 2009-2011, untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio likuiditas yaitu untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan analisis rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.



Analisis rasio keuangan daerah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 117. Analisis Rasio Keuangan

NO	Uraian	(2009) (%)	(2010) (%)	(2011) (%)
1.	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	162.86	42.36	91.97
2.	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	151.66	39.52	26.48
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	1.83	5.44	11.28
4.	Rasio hutang terhadap modal	1.99	5.95	12.88
5.	Rata-rata umur piutang	-	-	-
6.	Rata-rata umur persediaan	-	-	-
dst.	Rasio(lainnya)	-	-	-

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas, rasio likuiditas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dihitung dengan menggunakan rasio lancar atau *current ratio* dan *quick ratio*. Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan antara aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan *rasio quick* = (aktiva lancar-persediaan) dibagi kewajiban jangka pendek. Dari kedua cara tersebut, dapat di lihat bahwa rasio likuiditas atau kemampuan daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rata-rata sebesar lebih dari 90 persen. Hal ini berarti hutang jangka pendek pemerintah daerah dapat ditutupi dengan aktiva lancar yang ada. Rasio solvabilitas atau kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dapat dihitung dengan dua cara yaitu : (1) rasio total hutang terhadap total aset dan (2) rasio hutang terhadap total ekuitas. Kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa hutang pemerintah daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat tertutupi oleh aset dan ekuitas yang dimiliki oleh daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.



.3. Analisis Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima (5) tahun kedepan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama. Kebijakan dan proyeksi pendapatan daerah provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2018 digambarkan pada tabel berikut :

Penghitungan kerangka pendanaan dan rencana penggunaannya disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 118. Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
1.	Pendapatan	2.088.068,498,771 .20	2,296,875,348,648 .32	2,526,562,883,513 .15	2,779,219,171,864 .47	3.057,141.089.050 .91
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-				
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	1,579,265,748.50	1,737,192,323.35	1,910,911,555.69	2,102.002,711.25	2,312,202,982.38
	Total penerimaan	2.089,647,764,519 .70	2,298,612,540,971 .67	2,528,473,795.068 .84	2,781,321,174,575 .72	3.059,453,292.033 .29
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2,289,596,399,889 .70	2,518,556.039,878 .67	2,770,411,643,866 .54	3.047,452,808,253 .19	3,352,198.089.078 .51
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	(199,948,635,370. 00)	(219,943,498,907. 00)	(241,937,848,797. 70)	(266,131,633,677. 47)	(292,744,797.045. 22)

Sumber : BPKAD Prov. Sultra

Catatan Koreksi : kapasitas riil kemampuan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Tahun 2014 – 2018 yang disesuaikan dengan Target penerimaan yang dikelola daerah di kurangi belanja pegawai.



Tabel 119. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	(199,948,635,370.00)	(219,943,498,907.00)	(241,937,848,797.70)	(266,131,633,677.47)	(292,744,797.045.22)
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	629,379,377,183.26	692,317,314,901.59	761,549.046,391.75	837,703,951.030.92	921,474,346,134.01
II.a	Belanja Langsung	744,142,228,643.00	818,556,451,507.30	900,412.096,658.03	990,453,306,323.83	1.089,498,636,956.22
II.b	Pembentukan dana cadangan					
	Dikurangi:					
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	633,839,403,748.66	697,223,344,123.53	766,945,678,535.88	843,640,246,389.47	928.004,271.028.42
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	46,293,500.000.00	50,922,850.000.00	56.015,135.000.00	61,616,648,500.00	67,778,313,350.00
II	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	64.009,324,894.34	70,410,257,383.77	77,451,283,122.15	85,196,411,434.36	93,716.052,577.80
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	64.009,324,894.34	70,410,257,383.77	77,451,283,122.15	85,196,411,434.36	93,716.052,577.80
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	607,720,968,385.19	668,493.065,223.71	735,342,371,746.08	808,876,608,920.68	889,764,269,812.75
III.a	Belanja Tidak Langsung	1,499,160,671,246.70	1,649.076,738,371.37	1,813,984,412,208.51	1,995,382,853,429.36	2,194,921,138,772.29
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	530,653,400,826.89	583,718,740,909.58	642.090,615.000.54	706,299,676,500.59	776,929,644,150.65
III	Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)	968,507,270,419.81	1.065,357,997,461.79	1,171,893,797,207.97	1,289.083,176,928.77	1,417,991,494,621.64
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)*	(1,232,465,230,684.15)	(1,355,711,753,752.56)	(1,491,282,929,127.82)	(1,640,411,222.040.60)	(1,804,452,344,244.66)

Sumber : BPKAD Prov. Sultra, Tahun 2012



Tabel 116 menunjukkan bahwa rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah mengalami defisit selama periode RPJMD tahun 2014-2018. Pada tahun pertama mengalami defisit sebesar Rp.(1,232,465,230,684.15). Selanjutnya untuk tahun kedua mengalami defisit sebesar Rp.(1,355,711,753,752.56), tahun ketiga Rp.(1,491,282,929,127.82), tahun keempat sebesar Rp.(1,640,411,222.040.60) dan tahun kelima sebesar Rp.(1,804,452,344,244.66). Sumber pendanaan dalam rangka menanggulangi defisit sebagaimana tersebut di atas, direncanakan diperoleh melalui pendanaan dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Tabel 120. Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

No.	Jenis Dana	Alokasi									
		Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Tahun V	
		%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp
1.	Prioritas I		232,752,623,542.00		264,134.055,434.00		486,191,951,565.00		371,199,881,555.00		472,862.041,460.00
2.	Prioritas II		301,818,190,763.00		408,272,316,874.17		473,769,314,248.15		468,870,148,846.00		456,589,758,366.03
3.	Prioritas III		132,792,110,499.27		226,835,483,327.35		159,739,118,411.00		285,617,919,930.00		398,572,900,134.03
	Total		667,362,924,804.27		899,241,855,635.52		1,119,700,384,224.15		1,125,687,950,331.00		1,328.024,699,960.06

Sumber : BPKAD Prov. Sultra

Tabel diatas menggambarkan belum begitu tingginya kemampuan fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membiayai pembangunan daerah, maka kebijakan-kebijakan yang perlu diambil guna mengoptimalkan pendapatan daerah, antara lain :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru.
2. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
3. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
4. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.
5. Meningkatkan dana dari pusat diluar DAU dan DAK ke daerah.
6. Meningkatkan kontribusi Badan usaha Milik Daerah (BUMD).